

**KEBIJAKAN EL SALVADOR DALAM MENGADOPSI BITCOIN  
SEBAGAI *LEGAL TENDER* PADA TAHUN 2017 - 2021  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**YUSUF FERDY HIDAYAT**

19323226

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**KEBIJAKAN EL SALVADOR DALAM MENGADOPSI BITCOIN**

**SEBAGAI *LEGAL TENDER* PADA TAHUN 2017 - 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**YUSUF FERDY HIDAYAT**

19323226

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN EL SALVADOR DALAM MENGADOPSI BITCOIN  
SEBAGAI LEGAL TENDER PADA TAHUN 2017 – 2021**  
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

24 Agustus 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

- Dewan Penguji
- 1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
  - 2 Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.
  - 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

*Hangga Fathana*

*Gustri Eni Putri*

*Masitoh Nur Rohma*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023



---

*Yusuf Ferdy Hidayat*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>ABSTRAK</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	6
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	6
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	7
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	9
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	11
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	12
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	12
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	13
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	13
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	14
<b>BAB II KONTEKS MONETER DI NEGARA EL SALVADOR</b>	15
<b>2.1 Kebijakan El Salvador Mengadopsi Dolar Amerika Serikat</b>	15
<i>2.1.1 Identifikasi Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Dolarisasi</i>	16
<i>2.1.2 Faktor Pendorong Kebijakan Dolarisasi</i>	18
<i>2.1.3 Dampak Kebijakan Dolarisasi di El Salvador</i>	21
<b>2.2 Bitcoin Dalam Sistem Moneter Internasional</b>	24
<i>2.2.1 Kondisi Sistem Moneter Internasional Saat Ini</i>	25
<i>2.2.2 Faktor Pertimbangan Bitcoin Dalam Sistem Moneter Internasional</i>	27
<b>2.3 Tinjauan Terkait Bitcoin di Negara Sekitar El Salvador</b>	29
<i>2.3.1 Tinjauan Terkait Bitcoin di negara Amerika Serikat</i>	30
<i>2.3.2 Tinjauan Terkait Bitcoin di negara Honduras</i>	31
<i>2.3.3 Tinjauan Terkait Bitcoin di negara Guatemala</i>	31
<b>BAB III ANALISIS KEBIJAKAN EL SALVADOR MENGGUNAKAN TEORI <i>BOUNDED RATIONALITY</i></b>	33

<b>3.1 Kemampuan Dalam Memprediksi</b>	35
3.1.1 <i>Analisis Keterbatasan Waktu</i>	36
3.1.2 <i>Analisis Keterbatasan Sumber Daya</i>	37
<b>3.2 Kemampuan Dalam Memproses Informasi</b>	39
3.2.1 <i>Analisis Keterbatasan Dalam Mengatasi Masalah</i>	39
3.2.2 <i>Analisis Keterbatasan Dalam Memproses Informasi</i>	42
<b>BAB IV</b>	45
<b>PENUTUP</b>	45
<b>4.1 Kesimpulan</b>	45
<b>4.2 Rekomendasi</b>	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	52

## DAFTAR SINGKATAN

ANEP	Asociación Nacional de la Empresa Privada
ARENA	Alianza Republicana Nacional
AS	Amerika Serikat
ATM	Automatic Teller Machine
BANDESAL	Banco de Desarrollo de El Salvador
BCH	Banco Central de Honduras
BRICS	Brazil Russia India China South Africa
BTC	Bitcoin
GDP	Gross Domestic Product
IMF	International Monetary Fund
PDB	Produk Domestik Bruto
RUU	Rancangan Undang-undang
SIB	Superintendencia de Bancos
SVB	Silicon Valley Bank
US	United States
USA	United States America
USD	United States Dollar

## ABSTRAK

Kebijakan El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender*, telah menuai banyak kritik serta penolakan bahkan dari masyarakat El Salvador sendiri. Pasalnya, Bitcoin merupakan hal baru dalam teknologi keuangan sehingga, informasi mengenai hal tersebut cenderung terbatas. Akibatnya, banyak kekhawatiran yang terjadi mengenai kebijakan tersebut terkait resiko yang mungkin terjadi. Maka dari itu, penting untuk mengetahui latar belakang dibalik kebijakan yang diambil oleh pemerintah El Salvador tersebut. Dalam menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan teori *Bounded Rationality*. Teori tersebut, menjelaskan bahwasannya terdapat keterbatasan-keterbatasan terkait kemampuan yang dimiliki oleh pengambil kebijakan yang membuat kebijakan tersebut diambil berdasarkan aturan praktis atau pendekatan heuristik, di mana hal ini dapat dilihat dalam proses pengimplementasian kebijakan El Salvador tersebut. Adapun, keterbatasan tersebut meliputi keterbatasan waktu, sumber daya, penyelesaian masalah dan pemrosesan informasi. Keterbatasan waktu, mengacu pada waktu terkait peristiwa-peristiwa yang meliputi pengumuman, pengesahan, dan pemberlakuan kebijakan. Keterbatasan sumber daya, mengacu pada kesiapan infrastruktur teknologi, dan kesiapan terkait resiliensi dampak. Keterbatasan dalam penyelesaian masalah mengacu realisasi tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan keterbatasan dalam memproses informasi mengacu pada pemrosesan informasi yang tidak proporsional yang ditunjukkan dengan proses pengimplementasian kebijakan yang tidak mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki.

**Kata Kunci:** El Salvador, Bitcoin, *Legal Tender*, *Bounded Rationality*

## ABSTRACT

*El Salvador's policy of adopting Bitcoin as Legal Tender has drawn a lot of criticism and rejection even from the people of El Salvador themselves. The reason is, Bitcoin is a new thing in financial technology, so information about it tends to be limited. As a result, there are many concerns about the policy regarding the risks that might occur. Therefore, it is important to know the background behind the policies taken by the El Salvador government. In analyzing this, researchers used the Bounded Rationality theory. This theory explains that there are limitations related to the ability of policy makers to make the policy taken based on rules of thumb or a heuristic approach, where this can be seen in the process of implementing the El Salvador policy. Meanwhile, these limitations include limited time, resources, problem solving and information processing. Time limitation, refers to the time related to events which include the announcement, ratification, and implementation of policies. Limited resources, referring to the readiness of technological infrastructure, and readiness related to impact resilience. Limitations in solving problems refer to the realization of the goals to be achieved, and limitations in processing information refer to disproportionate information processing which is shown by the process of implementing policies that do not consider the limitations possessed.*

**Keywords:** El Salvador, Bitcoin, *Legal Tender*, *Bounded Rationality*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era digital saat ini banyak terjadi kemajuan teknologi yang muncul baik dari bidang komunikasi dan informasi hingga teknologi internet di mana hal itu telah menarik perhatian banyak orang. Sejalan dengan kemajuan teknologi juga telah menciptakan kebiasaan baru yang serba digital sehingga dengan mudahnya dapat terhubung dengan banyak orang di dunia serta melakukan banyak hal salah satunya adalah transaksi yang dilakukan secara online. Dalam melakukan transaksi, erat kaitannya dengan alat tukar berupa uang di mana uang ini juga telah mengalami perkembangan.

Dalam melakukan transaksi di era digital saat ini, alat pembayaran yang digunakan tidak hanya memakai sejumlah nominal uang tunai saja, tetapi juga dapat memakai alternatif pembayaran yang berupa uang virtual atau *Cryptocurrency* di mana salah satu yang populer di antaranya adalah bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang yang tidak memiliki bentuk fisik, berbeda dengan mata uang konvensional di mana pembuatan dan peredarannya diatur oleh Bank Sentral sementara, mata uang bitcoin dapat dibuat dan diedarkan oleh semua orang menggunakan jaringan *peer to peer*. Mata uang digital bitcoin terdapat dalam akun elektronik yang berupa dompet digital atau disebut *e-wallet*. Dompet Digital atau *e-wallet* merupakan wadah mata uang Bitcoin tersebut, selain digunakan sebagai tempat penyimpanan

juga digunakan sebagai metode transaksi pembayaran dan juga untuk diuangkan dalam mata uang tertentu. Di dalam *e-wallet* terdapat teknologi yang namanya *Blockchain* yaitu sebuah sistem yang menyimpan data secara digital dan saling terkoneksi satu sama lain, sistem ini lah yang menghubungkan seluruh pemilik bitcoin dalam basis data yang terintegrasi. Bitcoin juga memperbolehkan adanya kepemilikan tanpa identitas sehingga dapat memungkinkan seseorang untuk memindahkan kekayaannya dengan mudah. Selain itu, ada juga teknologi kriptografi di dalam mata uang digital Bitcoin yang bekerja sebagai sistem keamanan. Nilai Bitcoin sendiri, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, meski begitu Bitcoin cukup menarik minat banyak orang dikarenakan harganya yang hampir selalu mengalami peningkatan (Wijaya 2019).

Adanya bank-bank di dunia yang mengalami *collapse* mulai dari SVB (Silicon Valley Bank) dan bank-bank lainnya seperti First Republic Bank di Amerika, telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan orang-orang terhadap Bank Konvensional dan lebih memilih untuk beralih ke *Cryptocurrency*. Selain itu, The Fed yang menurunkan suku bunga, juga dapat menjadi momen kenaikan atau *Catalyst* bagi *Cryptocurrency* seperti Bitcoin hingga aset lainnya yang bersifat *High Risk* atau aset yang memiliki imbal hasil lebih tinggi lainnya. Tetapi, perlu diperhatikan bahwasannya orang di balik kemunculan bitcoin yang merupakan pengembang serta perancang bitcoin ini, sengaja membatasi jumlah peredaran bitcoin yang hanya sampai dengan 21 Juta keping bitcoin sampai tahun 2140, belum ada alasan yang jelas mengenai pembatasan jumlah tersebut tetapi hal ini dianggap dilakukan agar aman dari inflasi (Böhme, Rainer, Christin, Edelman, and Moore 2015).

*Legal Tender*, merupakan alat pembayaran yang sah secara hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh Bank Sentral suatu negara untuk melakukan transaksi keuangan. Adapun bentuk dari *Legal Tender* meliputi uang kertas, uang logam, cek, giro dan uang digital. El Salvador adalah negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai *Legal Tender* di samping adanya Dolar Amerika yang masih berlaku di negara tersebut. Sebelum adanya keputusan untuk mulai mengadopsi Dolar Amerika dan Bitcoin, El Salvador telah mengalami beberapa rintangan dalam sejarahnya dengan berbagai kebijakan moneter yang telah dikeluarkan. Pada tahun 1892, El Salvador telah menggunakan mata uang yang disebut Colón, nama tersebut diambil dari penjelajah Spanyol yaitu Cristobal Colón atau yang lebih dikenal sebagai Christopher Columbus, dengan nilai tukar Colón pada saat itu adalah senilai 2 Colón sama dengan 1 Dolar AS. Pada awalnya, mata uang Colón terikat dalam standar emas yang bernilai 1,69gram. Namun, setelah Perang Dunia I banyak negara yang mulai meninggalkan standar emas dan hal ini membuat El Salvador mengalami inflasi pada sekitar tahun 1930-an hingga membuat El Salvador terpaksa untuk mengikat mata uang Colón dengan Dolar Amerika. Selain itu, Pemerintah El Salvador juga melakukan nasionalisasi perbankan dengan tujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kredit dari pihak bank dalam jumlah, jangka waktu, serta dengan suku bunga tertentu. Tetapi, hal ini telah menunjukkan bahwa proses akses kredit tersebut telah dipolitisasi (Hidalgo 2009).

El Salvador pernah mengalami konflik perang saudara yang telah mengakibatkan banyak kerugian mulai dari infrastruktur hingga perekonomian dan membuat angka inflasi melambung sangat tinggi pada tahun 1980. Pada tahun 1992,

ketika perang saudara di El Salvador berakhir dengan adanya penandatanganan perjanjian perdamaian Chapultepec yang melibatkan presiden Alfredo Cristiani dalam perundingan tersebut, perekonomian El Salvador perlahan mulai membaik serta didukung dengan berbagai kebijakan yang dapat berimplikasi terhadap stabilitas keuangan. Hingga akhirnya pada tahun 2001, mata uang Colón berhenti dari peredaran dan El Salvador resmi melakukan Dolarisasi dengan mengadopsi Dolar Amerika sebagai mata uang secara penuh. Terdapat berbagai macam alasan yang mendasari keputusan El Salvador yang mengadopsi Dolar Amerika tersebut, mulai dari transformasi sistem keuangan hingga upaya peningkatan perekonomian El Salvador. Meski begitu, alasan atau dasar di balik kebijakan pengadopsian Dolar AS tersebut tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian saja, tetapi juga untuk kepentingan sektor keuangan dan pengusaha yang mengendalikan partai Alianza Republicana Nacional (ARENA) atau partai sayap kanan yang berkuasa di El Salvador pada saat itu (Towers and Borzutzky 2004).

Pada tahun 2017, Bitcoin pernah mengalami kenaikan nilai atau *Rally* di mana, harga Bitcoin naik secara dramatis dalam waktu yang relatif singkat. Ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk peningkatan minat investor, pemberitaan media yang luas, dan spekulasi pasar yang tinggi. Pada saat itu, banyak orang yang mulai menyadari potensi teknologi blockchain di balik Bitcoin dan mencari peluang investasi. Selain itu, beberapa pengumuman tentang adopsi Bitcoin oleh perusahaan besar juga turut mempengaruhi kenaikan harga. Hingga, pada tanggal 7 September 2021, negara El Salvador resmi menjadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai *Legal Tender*. Dengan mengesahkan undang-undang yang menetapkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah atau *Legal Tender*, semua usaha atau

bisnis hingga pembayaran pajak dapat menerima pembayaran melalui Bitcoin. El Salvador, merupakan negara yang menghadapi hambatan terutama dalam hal keamanan dan kebijakan ekonomi. Meskipun menghadapi hambatan, negara ini diakui sebagai contoh bagaimana penerapan kebijakan ekonomi yang bebas dan koheren dapat mendorong perkembangan, serta bagaimana peluang globalisasi dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang yang memiliki rencana reformasi yang tepat (Hidalgo 2009).

Presiden Nayib Bukele sebelumnya, telah menyuarakan penggunaan bitcoin dalam konferensi pada tahun 2021 karena potensi yang dianggapnya dapat membantu masyarakat El Salvador yang tinggal di luar negeri supaya dapat mengirim uang mereka yang berada di luar negeri kembali ke negaranya, masalah yang sering dialami berupa remitansi. Tetapi, di lain sisi Presiden Nayib Bukele dari awal dianggap sudah tergila-gila dengan bitcoin, data terakhir didapatkan bahwa harga atau nilai Bitcoin telah jatuh sebesar 45% dari puncaknya yang hampir 68.000 USD pada awal November 2022, hal ini berarti bahwa negara El Salvador telah mengalami kerugian kurang lebih 20 Juta USD menurut perhitungan Bloomberg News. Dilain sisi, terdapat laporan bahwa Presiden Nayib Bukele bersama dengan Bank Sentral El Salvador atau *Banco Central de Reserva de El Salvador* dilaporkan telah berusaha melobi IMF untuk meminjam dana sebesar 1,3 Miliar USD atau jika dirupiahkan menjadi 18,6 Triliun. Dirinya telah memprediksi bahwa negaranya akan menjadi pusat keuangan lewat kota bitcoin namun, yang terjadi tidak sesuai harapan (Cafarella 2021).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa El Salvador mengambil kebijakan mengadopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender* pada tahun 2017 - 2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa El Salvador mengambil kebijakan mengadopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender*. Adapun analisa tersebut meliputi informasi yang lebih mendalam yang dapat menjadi alasan dalam pengambilan kebijakan tersebut untuk tetap diputuskan meskipun terjadi banyak penolakan ataupun kritik baik dari masyarakat El Salvador maupun dari lembaga keuangan internasional terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, dikarenakan Bitcoin merupakan sebuah hal baru dalam dunia keuangan yang memerlukan pengawasan karena belum diketahui dampak yang dapat terjadi dalam penggunaannya untuk jangka panjang, sehingga kebijakan El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin ini berpotensi menimbulkan banyak resiko. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui mengapa El Salvador mengambil kebijakan tersebut.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penulis menganalisis terkait mengapa El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai *legal tender*. Titik awal penelitian ini dimulai sejak Bitcoin mengalami *Rally* pada tahun 2017, di mana nilai atau harga Bitcoin pada tahun tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan di mana, pada awal tahun 2017 senilai 1 BTC = 1.000 USD, menjadi 1 BTC = 20.000 USD pada akhir tahun. Kemudian, dilanjutkan ketika munculnya wacana atau perdebatan setelah Nayib Bukele

mengumumkan niatnya dalam konferensi Bitcoin pada tahun 2021, di mana pemerintahan El Salvador mulai merancang undang-undang yang membuat Bitcoin menjadi diakui sebagai *Legal Tender* di negaran El Salvador.

Setelah ia mengumumkan niatnya di mana kemudian, pemerintah El Salvador, mulai merancang RUU Bitcoin yang disahkan pada 9 Juni 2021 dan mulai diberlakukan pada 7 September 2021. Selama rentang waktu tersebut, banyak hal-hal yang menunjukkan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam pengambil kebijakan selama proses pengimplementasian kebijakan.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa literatur ilmiah yang dapat digunakan untuk membantu dan menunjang penelitian ini dengan adanya beberapa informasi tambahan yang dapat melengkapi penelitian ini supaya lebih baik. Pertama, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rivera-Solis dan Luis Eduardo yang membahas mengenai Dolarisasi di negara El Salvador di mana, Sebelumnya pada tahun 2001, negara El Salvador telah memutuskan untuk mengadopsi US Dollar sebagai alat pembayaran yang sah secara penuh. Hal ini dilakukan karena adanya beberapa faktor di antaranya, negara El Salvador cukup bergantung pada remitansi atau pengiriman uang oleh masyarakat El Salvador yang tinggal di Amerika Serikat. Diperkirakan ada sekitar dua juta masyarakat El Salvador yang tinggal di Amerika Serikat. Diperkirakan juga masyarakat Salvador mengirim uang mereka sekitar 1,97 miliar USD di mana angkut tersebut telah mewakili sekitar 13% dari PDB El Salvador (Rivera-Solis and Eduardo 2012).

Berikutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Vittorio Corbo, Andres Elberg, dan Jose Tessada pada tahun 1999 mengenai pola politik moneter di Amerika Latin. Adapun beberapa faktor penting di balik pengambilan kebijakan moneter di negara-negara kawasan Amerika Latin, dimulai dari angka kemiskinan akibat inflasi tinggi yang terjadi pada tahun 1980. Lalu, tingkat pengangguran yang tinggi, hingga pajak yang terus naik di mana hal itu berpengaruh terhadap masyarakat. Instrumen yang digunakan oleh otoritas yang digunakan oleh pengambil kebijakan moneter pun telah berubah selama tahun 1990. Hal ini karena, pasar keuangan atau Financial Market telah mengalami perkembangan, perkembangan tersebut selain memberikan peluang, tetapi juga tantangan di mana tantangan tersebut berupa arus masuk modal yang dianggap dapat mengancam daya saing di beberapa sektor perdagangan di negara El Salvador. Bank Sentral dituntut untuk menstabilkan arus masuk modal. Pada tahun 1993, Bank Sentral mulai menggunakan pertukaran tetap atau Fixed Exchange Rate sebagai dasar kebijakan moneter (Corbo, Elberg and Tessada 1999).

Selain itu, ada juga penelitian lain pada tahun 2021 yang lalu, di mana penelitian tersebut membahas mengenai peran aset kripto sebagai *Legal Tender* dengan contoh negara El Salvador. Dimulai pada bulan Agustus 2021 yang lalu, Bank Sentral El Salvador menerbitkan rancangan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur prosedur lembaga keuangan resmi yang akan menyediakan layanan konversi dari USD ke Bitcoin. Standar teknis tersebut menetapkan persyaratan untuk melindungi kepentingan konsumen yang meliputi transparansi, privasi, hingga layanan pengaduan. Selain itu, ada juga upaya yang dilakukan untuk mendorong pengadopsian bitcoin, di mana pemerintah El Salvador telah merancang

program pengembangan kapasitas antara lain yang mencakup sesi informatif dan akan dijalankan secara keseluruhan oleh 4.000 instruktur, instruktur tersebut akan mendapat akses pada sekitar 50 lokasi yang telah ditetapkan pemerintah dan akan memberikan pelatihan. Oleh karena itu, salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menjelaskan cara mengunduh dan menggunakan dompet, serta mengajari orang-orang cara menggunakan ATM bitcoin. Terkait aspek yang lebih teknis, Pemerintah El Salvador juga telah meluncurkan dompet resmi yaitu Chivo Wallet yang dapat digunakan untuk mengirim atau menerima kiriman uang, dompet Chivo tersebut dapat diunduh dan diinstal secara gratis dan pengguna tidak dikenakan biaya atas transaksi mereka (Gorjon 2021).

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Bitcoin di El Salvador di mana, dalam penelitian ini nantinya akan menganalisis terkait proses pengimplementasian kebijakan yang dilakukan pada 7 September 2023, oleh Pemerintah El Salvador terkait adopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender*.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam melakukan analisis, penelitian ini nantinya menggunakan teori *Bounded Rationality*. *Bounded Rationality*, memiliki hubungan dengan kebijakan publik karena mempengaruhi cara pembuat kebijakan memahami dan merespon masalah kebijakan. Model ini menjelaskan bahwa, manusia dalam mengambil keputusan sering mengalami keterbatasan terkait kapasitas seseorang dalam memproses informasi dengan sempurna serta terbatas dalam mempertimbangkan

banyak faktor yang relevan. Perilaku rasional sendiri tidak semata-mata didorong oleh keuntungan moneter saja, tetapi juga dapat didorong oleh faktor emosional.

*Bounded Rationality* secara sederhana adalah model yang memberikan solusi dalam mengatasi kekurangan. Pengambil keputusan sendiri, tidak akan mempertimbangkan semua alternatif yang ada, pengambil keputusan akan memilih beberapa alternatif yang lebih menjanjikan. Model ini berasumsi bahwa setiap aktor yang menjadi pengambil keputusan, tidak mampu mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin saja terjadi. Diketahui bahwa perilaku dapat bersifat rasional atau irasional, begitu juga dengan preferensi, keyakinan, harapan, hingga proses pengambilan keputusan yang juga demikian. Model-model dalam decision making sendiri, muncul dan digunakan untuk memahami sikap dari pengambil keputusan dalam memutuskan suatu kebijakan yang akan diambil.

Dari sudut pandang *Bounded Rationality*, manusia memiliki kapasitas yang terikat secara inheren, dan berperilaku sesuai dengan keinginannya. Model ini berasumsi bahwa, manusia atau individu dianggap sebagai pembuat keputusan yang rasional dalam arti bahwa mereka mencoba untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang masuk akal, namun mereka dibatasi oleh adanya keterbatasan-keterbatasan, sehingga mereka membuat keputusan yang memadai secara praktis, meskipun tidak selalu optimal atau sempurna. (Jones 2002)

Dalam *Bounded Rationality*, terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan aspek kognitif pengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi pilihan kolektif, selain itu indikator tersebut juga dapat menjadi variabel dalam mengindikasikan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam pengambilan kebijakan, di antaranya:

## 1. Kemampuan Dalam Memprediksi

Sebagai pengambil kebijakan, kemampuan dalam memprediksi menjadi unsur penting dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan terlebih kebijakan atau keputusan tersebut mencakup pilihan kolektif serta mencakup banyak masyarakat dalam suatu negara. Kemampuan dalam memprediksi, berimplikasi terhadap keputusan yang diambil dan hasil yang diperoleh, maka dari itu pengambil kebijakan harus mampu memperhitungkan rentang waktu serta sumber daya yang dimiliki

## 2. Kemampuan Dalam Memproses Informasi

Kemampuan dalam memproses informasi menurut *Bounded Rationality*, seorang pengambil kebijakan cenderung memproses informasi secara tidak proporsional karena ketidakmampuan individu atau organisasi dalam menyesuaikan perilaku dengan informasi yang masuk dengan tingkat yang kompleks. Sehingga, terjadi proses stokastik atau kondisi acak yang membuat pengambil kebijakan mengalami keterbatasan dalam mengatasi masalah dan lebih menggunakan pendekatan aturan praktis atau disebut pendekatan heuristik yang berdasarkan keyakinan subjektif dikarenakan pemrosesan informasi yang dilakukan tidak proporsional.

### **1.7 Argumen Sementara**

El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender* dikarenakan, pengambil kebijakan dalam hal ini yaitu Pemerintah El Salvador memiliki keterbatasan-keterbatasan yang membuat mereka memutuskan untuk mengambil kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan heuristik di mana, pendekatan heuristik merupakan metode pemecahan masalah yang didasarkan pada aturan

praktis atau pengalaman tanpa mengandalkan pemrosesan informasi secara sistematis atau menyeluruh. Pengambilan kebijakan, lebih mementingkan proses daripada hasil akhir yang lebih menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dari implementasi kebijakan tersebut.

Lalu, apabila melihat berdasarkan apa yang telah dilakukan negara lain terhadap Bitcoin, pengambil keputusan masih belum mampu memberikan opsi lain yang lebih meyakinkan. Sehingga, kebijakan diambil tanpa memirikan alternatif yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara sekitarnya.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yaitu analisis deskriptif. Metode Penelitian tersebut, dilakukan menggunakan studi kasus serta teori sebagai landasan atau pijakan dalam menganalisis serta menjawab rumusan masalah. Selain itu, pendekatan dalam metode penelitian kualitatif juga merupakan bentuk penelitian di mana peneliti dalam mengumpulkan serta menganalisis suatu data menjadi sebuah bagian-bagian dari proses penelitian secara bersama sebagai partisipan dan dengan informan sebagai pemberi data.

### 1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Adapun Subjek dan Objek dalam Penelitian ini, yaitu Pemerintah El Salvador yang dipimpin oleh Presiden Nayib Bukele sebagai subjek dalam penelitian ini. Sedangkan, objek dalam penelitian ini yaitu kebijakan mengenai pengadopsian Bitcoin sebagai *Legal Tender* di Negara El Salvador.

### 1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Pada proses pengumpulan data, penulis mendapatkan data untuk diolah dengan mengumpulkan data dari berbagai macam literatur serta Studi Pustaka, mulai dari buku ataupun jurnal hingga artikel berita yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.8.4 *Proses Penelitian*

Proses penelitian ini nantinya akan dijalankan dengan beberapa proses yang runtut berdasarkan langkah-langkah yang dimulai dari, pengumpulan data yang berupa literatur ilmiah seperti buku dan jurnal, serta informasi-informasi pendukung yang diperoleh dari beberapa artikel berita hingga laporan dan media yang kredibel, informasi tersebut adalah informasi yang relevan dan sesuai dengan konteks dikarenakan, nantinya informasi tersebut menjadi data untuk melakukan analisis. Kemudian, data tersebut dipetakan untuk dapat diterapkan dalam bentuk narasi pada masing bab dan sub-bab. Setelah memperoleh hasil analisis, dilanjutkan dengan menggagas kesimpulan yang berdasarkan hasil analisis tersebut.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini nantinya, terdiri dari beberapa bagian yang meliputi. Bab Pertama yang dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Cakupan Penelitian, hingga Sistematika Pembahasan. Berikutnya, pada bab 2 yang merupakan konteks moneter yang memuat informasi tambahan serta fakta-fakta mengenai kondisi yang terjadi di Negara El Salvador sebelum kebijakan diputuskan, hal ini berguna dalam memberikan pemahaman lebih dalam terhadap analisis yang dilakukan. Kemudian, adalah bab 3 yaitu Analisis Kebijakan El Salvador dalam Mengadopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender* di mana proses analisis terkait pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif lalu diolah dengan menggunakan teori yang terdapat dalam Kerangka Pemikiran. Dan bagian terakhir yaitu Bab 4, mengenai Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **KONTEKS MONETER DI NEGARA EL SALVADOR**

#### **2.1 Kebijakan El Salvador Mengadopsi Dolar Amerika Serikat**

Pada tanggal 1 Januari 2001 ketika di bawah era kepemimpinan Presiden Francisco Flores, dolarisasi resmi diberlakukan secara penuh di El Salvador di mana semua upah yang diberikan, semua dana atau anggaran yang digunakan, serta rekening keuangan hingga berbagai transaksi dikonversikan ke Dolar AS dan mata uang Colón mulai berhenti serta tidak lagi beredar dan digantikan oleh Dolar AS. Dolar AS sendiri, merupakan mata uang yang cukup populer, di mana banyak negara yang menggunakan Dolar AS dalam transaksi internasional. Tiap-tiap negara pada dasarnya memiliki masalahnya tersendiri dalam bidang ekonomi baik permasalahan ekonomi dalam skala nasional maupun internasional dengan akar permasalahan yang sama maupun berbeda, solusi atau langkah yang diupayakan serta diambil juga dapat memiliki kesamaan dengan negara lain, salah satunya adalah mengadopsi Dolar AS sebagai mata uang secara penuh atau Dolarisasi. Kebijakan untuk menggunakan Dolar AS sebagai mata uang secara penuh atau disebut Dolarisasi, juga dilakukan oleh beberapa negara-negara di kawasan Amerika Latin lainnya seperti Panama yang berupaya dalam memperbaiki krisis ekonomi, hingga Ekuador sebagai upaya dalam menstabilkan perekonomian.

Meski begitu, kebijakan Dolarisasi di El Salvador ini, tidak berlangsung begitu saja tanpa adanya kritik. Terdapat beberapa kekhawatiran setelah adanya kebijakan moneter ini, maka dari itu perlu untuk dilakukan peninjauan kembali untuk mengevaluasi serta menganalisis terkait kebijakan tersebut.

### *2.1.1 Identifikasi Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Dolarisasi*

Dalam proses dolarisasi, terdapat beberapa pihak yang terlibat sebelum dilakukannya Dolarisasi di El Salvador, mulai dari Pemerintah El Salvador, IMF, Bank Sentral, serta Pelaku ekonomi dalam hal ini meliputi, Pelaku Bisnis atau Masyarakat dan Bank-bank Komersial. Pihak yang terlibat tersebut memiliki perannya masing-masing dalam mendorong kebijakan tersebut.

#### 1. Pemerintah El Salvador

Pemerintah mempunyai peran penting dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan dolarisasi dengan tanggung jawab untuk mengambil keputusan politik dan ekonomi yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Selain itu, Pemerintah juga berperan sebagai aktor internasional yang merancang strategi ekonomi dengan tujuan untuk mengintegrasikan perekonomian domestik terhadap ekonomi internasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketergantungan ekonomi, kondisi sosial-politik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menandatangani kesepakatan.

#### 2. IMF (International Monetary Fund)

IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas moneter internasional dengan memantau dan memperhatikan kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya. Selain itu, IMF dapat memberikan saran dan dukungan melalui bantuan terhadap negara anggotanya. Dalam konteks kebijakan dolarisasi di El Salvador, IMF memberikan bantuan pinjaman

keuangan untuk membantu El Salvador saat melalui masa transisi dari Colón ke Dolar AS.

### 3. Bank Sentral

Bank Sentral El Salvador atau *Banco Central de Reserva de El Salvador*, memiliki tugas untuk menjaga stabilitas ekonomi El Salvador serta turut membantu merumuskan kebijakan terkait dolarisasi bersama pemerintah El Salvador. Bank Sentral turut menganalisis dalam menentukan apakah langkah untuk mengadopsi Dolar AS merupakan langkah yang tepat atau tidak. Selama proses dolarisasi, bank sentral dapat memastikan bahwa bank-bank komersial di El Salvador untuk mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku terkait penggantian mata uang Dolar AS, layanan konversi mata uang Dolar AS, dan membantu bank-bank komersial melalui edukasi dan memberikan panduan untuk dapat beradaptasi dengan sistem perbankan mereka. Bank Sentral, juga ikut memastikan kepatuhan terhadap persyaratan dan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan dolar sebagai mata uang resmi.

### 4. Pelaku Bisnis dan Masyarakat

Pelaku bisnis dan Masyarakat memiliki peran sebagai penggerak kebijakan ataupun entitas yang terlibat langsung dalam proses dolarisasi. Pelaku bisnis dan Masyarakat harus beradaptasi dengan mata uang baru, berbagai kegiatan mulai dari penghitungan harga, anggaran serta biaya dan akuntansi dalam hal apapun harus disesuaikan dengan sistem pembayaran yang menggunakan mata uang yang baru.

## 5. Bank Komersial

Bank Komersial dalam proses dolarisasi juga memiliki peran penting dengan yang lain. Bank Komersial beradaptasi dengan mata uang baru dengan mengganti rekening dan sistem perbankan mereka. Selain itu, Bank Komersial juga turut membantu nasabah mereka dalam menggunakan mata uang baru.

### 2.1.2 *Faktor Pendorong Kebijakan Dolarisasi*

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan El Salvador melakukan Dolarisasi atau mengadopsi Dolar Amerika yang menggantikan mata uang Colon. Pertama, El Salvador mengadopsi Dolar AS adalah sebagai salah satu upaya pemulihan atau transformasi ekonomi pasca terjadinya perang saudara di El Salvador sekitar tahun 1980-1992. Diperkirakan, konflik tersebut telah merenggut setidaknya 75.000 nyawa atau 20 persen dari jumlah populasi masyarakat El Salvador pada saat itu. Selain itu, biaya pemulihan yang meliputi infrastruktur juga diperkirakan mencapai 1,6 Miliar USD, Akibatnya selama periode 1979-1991, El Salvador mengalami inflasi yang sangat tinggi, dikarenakan adanya kontraksi dalam perekonomian akibat konflik tersebut. Terlepas dari adanya bantuan ekonomi selama terjadinya perang, perekonomian di El Salvador memburuk dengan PDB dari 727 Colon per kapita pada tahun 1980 menjadi 665 Colon pada tahun 1992 (Ugalde, Antonio, Ernesto, Castillo, Paz, and Canas 2000).

Kemudian, alasan mengadopsi Dolar AS berikutnya adalah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian di El Salvador. Pasalnya, El Salvador adalah negara yang cukup bergantung pada kegiatan remitansi dari pekerja migran di Amerika Serikat. Perekonomian di El Salvador didominasi oleh sektor

jasa yang mencapai 50 persen dari jumlah GDP, diikuti dengan sektor pertanian yang memproduksi hingga 24 persen dari jumlah GDP dan sektor industri yang hanya mencapai 20 persen dari jumlah GDP. Selain itu, total jumlah remitansi yang dilakukan oleh pekerja migran El Salvador di Amerika Serikat mencapai 1,9 miliar USD atau sekitar 15 persen dari jumlah GDP pada tahun 2001. Maka dari itu, El Salvador perlu melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengadopsi Dolar AS diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, dengan menekan biaya transaksi pertukaran yang terkena pengiriman uang dan perdagangan, hal ini tentu akan menguntungkan bagi masyarakat dan ekonomi (Benomi and Lindahl 2014).

Adapun alasan lainnya dari keputusan yang mengadopsi Dolar AS adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor asing serta menarik investor asing dan mempermudah transaksi dalam perdagangan internasional serta mempermudah akses ke pasar global. Sebelumnya, Dolar AS merupakan mata uang internasional yang cukup dominan dalam perdagangan internasional dan paling banyak digunakan dalam transaksi internasional, banyak negara yang menggunakan Dolar AS sebagai aset luar negeri selain itu, Dolar AS juga dianggap memiliki tingkat resiko yang rendah. Dengan mengadopsi Dolar AS, investor dapat menanam modal dengan aman tanpa perlu khawatir akan tergerus oleh fluktuasi nilai mata uang lokal karena menggunakan mata uang yang dikenal secara global. El Salvador juga menunjukkan komitmen untuk dapat terlibat dalam ekonomi global dan berpartisipasi dalam perdagangan internasional dengan mengurangi kebutuhan untuk menukar mata uang saat bertransaksi dengan mitra internasional.

Meski begitu, alasan di balik kebijakan pengadopsian Dolar AS tersebut tidak hanya sebagai upaya terkait perekonomian saja, tetapi juga untuk kepentingan politik. Sebelumnya, El Salvador adalah negara dengan sistem demokrasi presidensial di mana kedudukan kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Terdapat partai sayap kanan bernama Alianza Republicana Nacional (ARENA) yang berkuasa di El Salvador sejak tahun 1989 dengan adanya koalisi yang bersifat konservatif. Partai ARENA ini, telah terbagi menjadi dua fraksi yaitu fraksi yang memegang sektor pertanian, sementara fraksi lainnya memegang sektor keuangan. Kedua fraksi tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda di mana, fraksi dengan sektor pertanian lebih mengutamakan strategi nasionalis yang melibatkan subsidi pemerintah dan kebijakan proteksionis, sedangkan sektor keuangan lebih mengutamakan pembentukan ekonomi yang terbuka, akses terhadap investasi asing, pengurangan hambatan perdagangan, dan pariwisata. Kekuasaan dari fraksi yang memegang sektor pertanian, telah mengalami penurunan sejak terjadinya perang saudara tahun 1980.

Ketika era Presiden Fransisco Flores pada tahun 1992-2004, telah mencerminkan sebuah oligarki yang baru. Presiden Fransisco Flores bersama koalisinya yaitu *National Association of Private Entrepreneurs* (ANEP) yang memiliki kedekatan dengan partai ARENA memutuskan untuk mengambil kebijakan Dolarisasi. ANEP berfungsi sebagai pembela keputusan partai ARENA, sementara partai ARENA menyesuaikan keputusannya dengan kepentingan sektor-sektor utama yang dipegang oleh ANEP termasuk didalamnya meliputi sektor keuangan dan manufaktur. Dalam proses pengambilan kebijakan untuk melakukan Dolarisasi, dianggap tidak melibatkan partai politik lainnya dan hanya melibatkan

partai ARENA saja, hal ini dikarenakan El Salvador tidak pernah mengalami *hyperinflation* sehingga, kebijakan untuk mengadopsi Dolar AS dianggap tidak berdasarkan kondisi ekonomi melainkan faktor politik. Selain itu, dapat dilihat juga bahwasannya kebijakan tersebut sangat menguntungkan bagi sektor keuangan (Towers and Borzutzky 2004).

### 2.1.3 Dampak Kebijakan Dolarisasi di El Salvador

Keputusan yang diambil oleh negara El Salvador dalam mengadopsi Dolar AS atau Dolarisasi telah menimbulkan beberapa perubahan dari segi ekonomi serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi negara El Salvador kedepannya. Pasalnya, dengan melakukan dolarisasi, hal ini sama seperti mendelegasikan tanggung jawabnya terkait kebijakan moneter dan juga nilai tukar mata uang terhadap bank sentral di negara tuan rumah atau *Host Country* dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Dengan mengadopsi mata uang Dolar AS, terdapat sisi negatif yang ditimbulkan serta mempengaruhi kondisi perekonomian kedepannya. Tetapi, juga dapat menimbulkan dampak positif meskipun, dalam implementasinya cukup membutuhkan waktu untuk mencapai efek positif secara maksimal (Hanifa, Aleyya, Depari, Maulana, and Alfa 2016).

Adapun evaluasi pertama pasca dilakukannya dolarisasi di El Salvador adalah terkait dengan stabilitas mata uang di El Salvador yang berkaitan dengan ekonomi makro yaitu tingkat inflasi. Sebelum El Salvador mengadopsi Dolar AS sebagai mata uang resminya pada tahun 2001, tingkat inflasi di negara El Salvador relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi tahunan sekitar 8,1% pada tahun 2000. Pada saat yang sama, tingkat inflasi di Amerika Serikat jauh lebih rendah, dengan tingkat inflasi tahunan sekitar 3,4% pada tahun 2000. El Salvador

pernah mengalami kenaikan inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1980 ketika terjadi perang saudara. Setelah El Salvador mengadopsi Dolar AS sebagai mata uang resminya, tingkat inflasi di negara tersebut cenderung turun dan cukup stabil. Tingkat inflasi tahunan rata-rata di negara El Salvador dari tahun 2001 hingga tahun 2020 cenderung lebih rendah dari tingkat inflasi tahunan rata-rata di Amerika Serikat selama periode yang sama. Tingkat inflasi di negara El Salvador cenderung stabil dan menurun.

Berikutnya, terkait dengan hubungan kerja sama antara El Salvador dan Amerika Serikat semakin erat pasca dilakukannya dolarisasi. Amerika Serikat adalah mitra perdagangan utama El Salvador dengan menjalin kesepakatan perdagangan bebas atau *Free Trade* yang telah melibatkan beberapa negara di Kawasan Amerika Tengah. Hubungan dagang antara El Salvador dan Amerika Serikat semakin meningkat dengan adanya keringanan tarif serta prosedur perdagangan yang tidak mempersulit. Terdapat beberapa perusahaan Amerika Serikat yang berinvestasi di El Salvador mulai dari Chevron yang bergerak di bidang minyak dan gas, Citigroup yang bergerak di sektor keuangan, hingga Walmart yang memiliki beberapa cabang di Kawasan El Salvador.

Meski begitu, sebelum El Salvador mulai melakukan dolarisasi, pemerintah El Salvador memiliki keyakinan bahwa dengan mengadopsi Dolar AS, negaranya akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, kenyataannya adalah setelah melakukan dolarisasi tingkat pertumbuhan ekonomi El Salvador mengalami penurunan, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebelumnya ketika menggunakan Colón mencapai 4,6% dan setelah melakukan dolarisasi tingkat pertumbuhan rata-ratanya menurun hingga 1,9% (Benomi and Lindahl 2014).

Adanya dolarisasi di El Salvador telah membuat negara tersebut cukup bergantung terhadap Amerika Serikat. Sebanyak 47% dari total nilai ekspor El Salvador diarahkan ke pasar Amerika Serikat pada tahun 2012, di mana artinya hampir setengah produk yang diekspor oleh El Salvador diarahkan ke Amerika Serikat. Sedangkan, 35% dari total nilai impor El Salvador berasal dari Amerika Serikat. Hal ini telah menunjukkan ketergantungan El Salvador dengan Amerika Serikat dalam melakukan perdagangan (Towers and Borzutzky 2004).

Selain itu, bahan evaluasi selanjutnya adalah kebijakan dolarisasi tersebut mendapat penolakan dan telah menimbulkan kontroversi, meskipun terdapat dukungan dari sebagian besar aktor bisnis di El Salvador. Di antara kelompok yang menentang kebijakan dolarisasi tersebut adalah para petani, pedagang kecil, hingga kelompok masyarakat miskin. Mereka mengkhawatirkan bahwa penggunaan dolar AS sebagai mata uang resmi berpotensi dapat menghilangkan fleksibilitas moneter dan kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu. Beberapa kelompok tersebut, juga mengkhawatirkan bahwa kebijakan dolarisasi dapat mengakibatkan peningkatan biaya hidup serta kesenjangan ekonomi. Selain itu, sejumlah akademisi dan ahli ekonomi juga mengkritik kebijakan dolarisasi El Salvador tersebut. Mereka berpendapat bahwa dengan tidak memiliki mata uang nasional, negara menjadi kehilangan kontrol atas kebijakan moneter dan tidak dapat merespons secara efektif terhadap perubahan kondisi ekonomi internal.

Pasalnya, Dolarisasi juga dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk mengatasi krisis keuangan baik melalui devaluasi ataupun redenominasi mata uang. Hal ini, dapat terjadi karena di bawah rezim dolarisasi, El Salvador tidak

mempunyai kendali atas kebijakan moneternya. Dolarisasi atau mengadopsi Dolar AS, telah membuat El Salvador menyerahkan otoritasnya terkait pasokan mata uang serta suku bunga kepada *The Fed*. Maka dari itu, pemerintah El Salvador tidak lagi mempunyai kuasa atas jumlah uang yang beredar serta suku bunganya. Dolarisasi telah memberikan beberapa keuntungan bagi El Salvador, tetapi dalam jangka panjang akan ada banyak kerugian yang diperoleh daripada keuntungannya. Penting bagi pemerintah El Salvador dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk memperluas akses kredit sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kelompok dengan pendapatan rendah. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan investasi asing baru yang dapat menciptakan lapangan kerja, apabila modal yang masuk hanya digunakan untuk sektor keuangan serta digunakan untuk tujuan spekulatif, maka kebijakan Dolarisasi ini menjadi gagal dalam menghasilkan efek positif terhadap kelompok miskin (Towers and Borzutzky 2004).

## **2.2 Bitcoin Dalam Sistem Moneter Internasional**

Bitcoin adalah salah satu terobosan yang inovatif dalam bidang teknologi keuangan dan cukup populer di antara mata uang kripto lainnya yang menawarkan beberapa kelebihan sehingga membuatnya dapat menjadi pilihan alternatif dalam menanggapi kondisi sistem moneter internasional saat ini yang begitu dinamis. Meskipun, keberadaan bitcoin banyak mendapat penolakan, tetapi bitcoin masih terus mendapat kepercayaan dari berbagai kalangan yang menganggap bahwa Bitcoin merupakan sebuah solusi dalam menghadapi kondisi yang begitu dinamis dalam sistem moneter internasional, hal inilah yang telah membuat keberadaan bitcoin dapat bertahan hingga saat ini.

### 2.2.1 *Kondisi Sistem Moneter Internasional Saat Ini*

Sistem moneter internasional saat ini masih didominasi oleh mata uang fiat seperti Dolar AS hingga Euro. Adapun standar yang digunakan dalam sistem moneter internasional pertama kali adalah emas di mana komoditas tersebut nantinya mulai digantikan dengan penggunaan uang kertas atau *Flat Money*. Standar moneter internasional memiliki dua kategori standar yaitu, standar barang dan standar kepercayaan. Pertama, terkait dengan standar barang di mana nilai uang dijamin berdasarkan pada berat barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan, standar kepercayaan adalah sebaliknya, di mana nilai uang tidak lagi berdasarkan berat barang. Selain itu, penggunaan uang kertas telah banyak menyimpan berbagai resiko mulai dari inflasi, hingga potensi adanya gelembung atau *Bubble*. Sistem moneter internasional yang awalnya menggunakan standar emas, mulai digantikan oleh Dolar AS sebagai standar utamanya hingga saat ini. Penggunaan Dolar AS tersebut, telah menimbulkan permasalahan seperti ketidakstabilan sistem moneter yang dapat mengakibatkan krisis di berbagai negara (Harahap, Hannum, Nurtivanny, Siregar, Kamil, and Tambunan 2022).

Sistem moneter internasional saat ini, diawasi oleh lembaga keuangan internasional yaitu IMF atau *International Monetary Fund*. IMF, telah memainkan peran penting dalam sistem moneter internasional dan perekonomian suatu negara. Selain melakukan pengawasan, IMF juga dapat memberikan bantuan ataupun pinjaman kepada suatu negara untuk menjaga kestabilan moneter internasional. Tetapi, dalam melakukan pinjaman ke IMF, terdapat beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi oleh negara yang hendak meminjam agar dapat menerima bantuan

dari IMF. Syarat-syarat tersebut, dianggap cenderung menguntungkan negara-negara maju yang menjadi anggota IMF (Pamungkas, Rahayu and Krisyanti 2019).

Sistem moneter internasional sepanjang sejarahnya juga pernah mengalami transformasi. Transformasi pertama dimulai tahun 1880, di mana negara-negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang mulai mengadopsi standar emas sehingga dapat mendorong perdagangan internasional. Nilai emas pada awalnya adalah 23,22 gram setara dengan 1 USD, perlahan mulai ditinggalkan. Pada saat perang dunia pertama, standar emas mulai ditinggalkan, dan nilai suatu mata uang dapat ditetapkan tanpa berdasarkan emas.

Transformasi sistem moneter kedua, terjadi setelah perang dunia kedua di mana lebih tepatnya pada tanggal 22 Juli 1944. Transformasi sistem moneter internasional kedua ini, ditandai dengan adanya kesepakatan oleh 44 negara dalam The Bretton Woods Conference. Emas kembali dipergunakan, tetapi standar perdagangan yang menggunakan emas hanya dapat dilakukan oleh bank sentral masing-masing negara. Nilai tukar atau kurs di semua negara, ditetapkan berdasarkan emas dan untuk menjaga stabilitas nilai kurs tersebut, diminta untuk dapat melakukan intervensi. Pada tahun 1946, masih dalam transformasi sistem moneter kedua, *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* mulai didirikan untuk mengawasi sistem moneter internasional. Seiring berjalannya waktu, dominasi emas mulai digeser dengan keberadaan Dolar AS. Hal ini dikarenakan banyaknya permintaan dunia terhadap Dolar AS sebagai bantuan dana dalam memulihkan keadaan ekonomi terkhusus negara-negara eropa. Maka dari itu, mata uang Dolar AS menjadi populer serta dianggap sebagai *Safe Heaven*

*Currency*, dan emas mulai tergeser. Inilah yang memicu transformasi sistem moneter internasional ketiga.

Pada tahun 1973, transformasi sistem moneter internasional kembali terjadi untuk ketiga kalinya. Pada era transformasi sistem moneter internasional ini, standar emas mulai ditinggalkan dan lebih menggunakan Dolar AS dikarenakan banyaknya spekulasi pasar terhadap sistem kurs yang sudah tidak layak. Sejak tahun 1973, sistem moneter internasional telah berupa dua kombinasi antara nilai tukar tetap atau kurs tetap (*Fixed Exchange Rate*) dan nilai tukar yang mengambang bebas atau *Floating Exchange Rate*. Nilai mata uang global mulai berubah-ubah (Fluktuatif) tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar, lalu negara-negara mulai dapat ikut campur dalam pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi nilai mata uangnya yang berlebihan. Jika suatu negara mengalami defisit dalam neraca pembayarannya, atau menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka nilai tukar mata uang asing cenderung naik, dan salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui sistem *Managed or Dirty Float*, di mana masing-masing bank sentral suatu negara dapat melakukan intervensi dengan menjual mata uang asing. Begitu pula sebaliknya, jika terdapat surplus dalam neraca pembayaran, bank sentral dapat melakukan intervensi dengan membeli mata uang asing di pasar guna mengurangi penurunan nilai tukar (Wardhana 2022).

### 2.2.2 *Faktor Pertimbangan Bitcoin Dalam Sistem Moneter Internasional*

Bitcoin merupakan salah satu mata uang kripto yang dipercaya dapat menjadi pilihan alternatif dalam sistem moneter internasional. Bitcoin yang berjalan dengan sistem *Blockchain*, telah memberikan banyak manfaat dan berpotensi merubah atau melakukan transformasi dalam sistem moneter

internasional. Pasalnya, bitcoin yang menggunakan sistem *Blockchain* mempunyai kepercayaan karena banyaknya manfaat yang diperoleh melalui karakteristiknya. Adapun karakteristik yang dimiliki tersebut meliputi pertama adalah desentralisasi, transparansi, mudah dilacak atau *Traceability*, selalu tersedia atau *High Availability*, tingkat keamanannya yang tinggi atau *High Security*, simple, cepat, dan hemat biaya. Dengan mengimplementasikan inovasi teknologi dalam beberapa proyek pengembangan ekonomi, *Blockchain* tidak akan menjadi sebuah pengecualian untuk dapat memiliki tempat dalam sektor tersebut (Peña 2019).

Adapun penyebab dipilihnya Bitcoin sebagai alternatif berikutnya, adalah dikarenakan Bitcoin ini tidak terikat oleh pihak manapun atau tidak terdapat campur tangan pihak ketiga. IMF, memegang peran penting dalam sistem moneter internasional. Banyak negara khususnya negara yang sedang mengalami kesulitan terkait keuangan, cukup bergantung terhadap IMF perihal bantuan keuangan. Hal ini berpotensi memicu adanya perubahan-perubahan di dalam IMF dikarenakan adanya suatu kepentingan atau berpotensi menyebabkan adanya hegemoni. Bitcoin dapat muncul sebagai solusi dalam mengurangi ketergantungan tersebut dikarenakan, Bitcoin tidak mempunyai otoritas pusat dan tidak ada seorangpun yang dapat mengubahnya. Selain itu, Bitcoin juga dapat menjadi alternatif yang menarik dikarenakan tidak melibatkan penggunaan barang dalam bentuk fisik (Turpin 2014).

Selanjutnya, dikarenakan sistem moneter internasional saat ini banyak menggunakan Dolar AS sebagai standar utamanya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ketergantungan terhadap Dolar AS sudah mulai menurun. Banyak negara yang mencoba mengurangi ketergantungan tersebut dan mulai mencoba

menggunakan teknologi *Blockchain* dalam sistem perekonomiannya. Hal ini dapat dilihat dalam organisasi kerja sama yaitu BRICS. BRICS yang terdiri dari Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan juga mulai mencoba mengimplementasikan teknologi *Blockchain* dalam sistem perbankan di negara-negara tersebut (Gusarova, Gusarov, and Smeretchinskii 2021).

Banyaknya masalah dalam sistem moneter internasional saat ini telah membuat masyarakat dunia mulai tidak percaya lagi terhadap berbagai komponen yang ada dalam sistem moneter internasional seperti, penggunaan mata uang fiat, uang kertas atau Fiat Money, dan standar emas maupun dolar. Bitcoin dapat merevolusi sistem keuangan dengan menjadikannya sebagai sebuah sistem yang sepenuhnya digital dan desentralisasi. Bitcoin mengubah konsep mata uang dengan tidak lagi bergantung pada pencetakan oleh negara ataupun jaminan dari pihak tertentu, melainkan diciptakan dan dijamin oleh penggunanya sendiri. Sistem harga Bitcoin juga tidak lagi tergantung pada campur tangan pemerintah, tetapi murni berdasarkan penawaran dan permintaan pasar. Bitcoin menciptakan sistem yang didasarkan pada algoritma matematika dan tidak lagi dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak lain. Selain itu, karena perubahan sistem Bitcoin memerlukan persetujuan mayoritas penggunanya, teknologi yang digunakan juga mempunyai kemiripan dengan sistem demokrasi. (Fajri and Yamin 2019).

### **2.3 Tinjauan Terkait Bitcoin di Negara Sekitar El Salvador**

Berbeda dengan negara El Salvador, negara lainnya di Kawasan Amerika termasuk Amerika Serikat diketahui masih belum mengesahkan Bitcoin sebagai *Legal Tender*. Negara-negara yang belum mengesahkan tersebut masih

mempertimbangkan penggunaan Bitcoin dengan mengevaluasi dampak serta sisi negatif dari Bitcoin. Selain itu, Bitcoin juga tidak mengalami banyak perkembangan terkait penggunaannya sebagai *Legal Tender*. Meski begitu, El Salvador tetap berani mengambil tindakan yang menjadikan Bitcoin sebagai *Legal Tender* dengan adanya anggapan untuk mendukung dan menolak kebijakan tersebut (Jelita 2021)

### 2.3.1 Tinjauan Terkait Bitcoin di negara Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara besar yang belum mengakui Bitcoin sebagai *Legal Tender*. Meski begitu, terdapat beberapa daerah di Amerika Serikat yang telah mengeluarkan undang-undang yang mengakui Bitcoin sebagai aset digital yang sah. Pada tahun 2021, Negara Bagian Wyoming mengeluarkan undang-undang yang mengakui Bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai bentuk uang yang sah serta memperbolehkan bank-bank di wilayah tersebut untuk menyediakan layanan kustodian terhadap aset kripto. Selain itu, daerah Miami juga telah menjadi kota pertama di Amerika Serikat yang memperbolehkan warganya membayar pajak dengan Bitcoin.

Meski begitu, keberadaan Bitcoin di Amerika Serikat masih belum diakui sebagai mata uang yang legal. Perencanaan terkait regulasi terhadap aset kripto, masih terus dikembangkan di negara tersebut. Lembaga keuangan di Amerika Serikat seperti *The Fed*, telah mengambil beberapa langkah untuk mengatur dan mengawasi aspek-aspek tertentu dari Bitcoin dan uang kripto lainnya. *The Fed*, menekankan pentingnya pencegahan terhadap resiko-resiko tersebut dengan bermigrasi ke sektor keuangan dan mengawasi secara ketat, organisasi perbankan yang terpapar ke sektor aset kripto (Lesemann 2021).

### 2.3.2 Tinjauan Terkait Bitcoin di negara Honduras

Honduras adalah negara di kawasan Amerika Tengah bersama dengan Guatemala dan El Salvador yang menggunakan satuan mata uang yang disebut Lempira. Honduras mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah atau *Legal Tender* dengan cara yang berbeda tergantung dengan lokasinya. Di Honduras, terdapat Zona Ekonomi Khusus yang disebut *Honduras Prospera* di pulau Roatan dan kota La Ceiba, di mana wilayah tersebut merupakan Zona Ekonomi Khusus yang telah menerima Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sebagai *Legal Tender*. Meski begitu, *Banco Central de Honduras* (BCH) atau bank sentral Honduras telah mengklarifikasi bahwa Bitcoin belum menjadi alat pembayaran yang sah atau *Legal Tender* di negaranya. Maka dari itu, penerimaan Bitcoin di negara Honduras masih belum pasti dan akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan terkait Bitcoin terkhusus dalam wilayah Zona Ekonomi Khusus tersebut (Bignell 2022).

### 2.3.3 Tinjauan Terkait Bitcoin di negara Guatemala

Guatemala adalah negara di kawasan Amerika Tengah yang menggunakan quetzal sebagai mata uang resminya serta memiliki pandangan yang berbeda dengan El Salvador terkait Bitcoin. Guatemala tidak memandang Bitcoin sebagai legal tender meskipun penggunaan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya masih dapat diperdagangkan di Guatemala sebagai aset digital. Pasalnya, pada bulan Juni 2021, terdapat seorang anggota parlemen di Guatemala yang mengusulkan undang-undang untuk dapat membuat Bitcoin menjadi mata uang resmi kedua di negara tersebut, namun usulan tersebut belum disahkan menjadi undang-undang. Dilain sisi, terdapat beberapa perusahaan yang berkembang di Guatemala yang berfokus

terhadap penggunaan Bitcoin maupun mata uang kripto lainnya. Adanya proyek seperti *Bitcoin Lake* juga telah dilakukan di Guatemala untuk mempromosikan serta mempengaruhi masyarakat untuk tertarik dalam menggunakan Bitcoin. Namun, sebagian besar pemilik bisnis masih ragu untuk menerima dan menyimpan Bitcoin karena menganggap adanya tingkat volatilitas yang tinggi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Guatemala masih terbatas dan belum mendapat respons yang signifikan dari masyarakat. Selain itu, SIB atau *Superintendencia de Bancos* yang menjadi regulator perbankan di Guatemala, telah menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah atau *Legal Tender* di negaranya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang terkait moneter di negara Guatemala bahwa hanya quetzal yang merupakan alat pembayaran yang sah atau *Legal Tender* di Guatemala (Central America Data 2021).

## **BAB III**

### **ANALISIS KEBIJAKAN EL SALVADOR MENGGUNAKAN TEORI**

#### ***BOUNDED RATIONALITY***

Pada bab ini, akan menganalisa terkait kebijakan El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender* dengan mengimplementasikan teori *Bounded Rationality*. Pembahasan dimulai berdasarkan gagasan dalam *Bounded Rationality* yang meliputi kemampuan dalam memprediksi, serta cara ataupun upaya dalam memproses informasi yang tidak proporsional berdasarkan informasi yang dapat menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan-keterbatasan yang menjadi faktor dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan pada September 2021 yang lalu, banyak hal-hal yang dapat menjadi tolak ukur bahwasannya dalam pengambilan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya rasional. Apabila dilihat melalui sikap dari pengambil kebijakan dalam merespons informasi yang kompleks, hingga informasi mengenai tinjauan negara lain terkait penggunaan Bitcoin, serta kondisi negara El Salvador yang dapat memungkinkan kebijakan tersebut dapat berjalan dari segi infrastruktur. Hal ini telah menunjukkan bahwasannya pengambil kebijakan mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang melakukan prediksi, serta memproses informasi, sehingga membuat pengambil kebijakan menggunakan aturan praktis untuk memudahkan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap penilaian dan keputusan yang diambil.

Adapun indikator yang dapat menjadi variabel dalam penelitian ini berdasarkan *Bounded Rationality* yang dapat digunakan dalam menganalisa suatu kebijakan dalam hal ini yaitu kebijakan El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin. Pertama, terkait dengan kemampuan dalam memprediksi. Kemampuan dalam memprediksi mengacu terhadap keterbatasan dalam waktu dan keterbatasan dalam sumber daya. Kemudian, terkait dengan kemampuan dalam memproses informasi di mana, hal ini ditunjukkan dengan adanya keterbatasan dalam mengatasi masalah yang mengacu pada kesulitan pengambil kebijakan dalam melakukan trade-off antar tujuan, dan adanya pemrosesan informasi yang tidak proporsional sehingga pengambil kebijakan akan menggunakan aturan praktis (Jones 2002).

Dengan adanya indikator atau variabel tersebut dalam melakukan analisis, hal ini dapat memberikan pemahaman dari Pemerintah El Salvador terkait kebijakan yang diputuskan, serta mengetahui latar belakang di balik kebijakan El Salvador tersebut yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Penjabaran analisis dilakukan dengan mengaitkan beberapa kasus yang dapat mengindikasikan indikator-indikator sebagaimana *Bounded Rationality*. Analisis meliputi tujuan dari Presiden Nayib Bukele. Kemudian, menganalisis terkait waktu atau seberapa lama kebijakan ini mulai disahkan dan upaya yang dilakukan dalam mendukung kebijakan yang meliputi sektor yang berpengaruh dalam menunjang kebijakan ini, seperti pembangunan infrastruktur, ada juga upaya lain yang dapat mendukung kebijakan tersebut seperti pembelian Bitcoin yang menghabiskan banyak anggaran. Terakhir, analisis terkait pemrosesan informasi yang tidak proporsional, hal ini mengambil informasi yang meliputi pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh berdasarkan tujuan-tujuan dari kebijakan ini yang

dirumuskan berdasarkan permasalahan yang kompleks di negara El Salvador dan proses pengambilan kebijakan yang menunjukkan adanya penggunaan aturan praktis atau pendekatan heuristik.

### **3.1 Kemampuan Dalam Memprediksi**

*Bounded Rationality* mengacu terhadap pembuatan keputusan yang baik namun tidak optimal dengan mengadopsi pendekatan heuristik atau aturan praktis dan merupakan bentuk pengakuan dalam situasi dunia nyata, tetapi pembahasan terkait kapasitas kognitif pengambil kebijakan bukan menjadi indikasi kecerdasan ataupun cara berpikir yang tidak logis. Tingkat rasionalitas lebih berimplikasi terhadap pembuatan keputusan yang baik tetapi tidak optimal serta terdapat usaha dalam mencapai tujuan dengan cara yang memadai dibandingkan dengan mencari solusi yang sempurna dan memakan waktu serta sumber daya (Jones 2002, 272).

Sebagai pengambil kebijakan, kemampuan dalam memprediksi menjadi unsur penting dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan terlebih kebijakan atau keputusan tersebut mencakup pilihan kolektif serta mencakup banyak masyarakat dalam suatu negara. Kemampuan dalam memprediksi, berimplikasi terhadap keputusan yang diambil dan hasil yang diperoleh, maka dari itu pengambil kebijakan harus mampu memperhitungkan berbagai faktor, selain itu kemampuan dalam memprediksi juga dapat membantu pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi jangka panjang serta dampak dari tujuan yang ingin dicapai. Tetapi, kemampuan dalam memprediksi juga tidak dapat sepenuhnya berjalan atau memiliki keterbatasan sebagaimana *Bounded Rationality*. Menurut *Bounded*

*Rationality*, prediksi akan lebih fokus terhadap pemahaman terkait keterbatasan yang dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan secara kolektif,

### 3.1.1 Analisis Keterbatasan Waktu

Pemerintah El Salvador, perlu untuk menetapkan dan mengimplementasikan kerangka regulasi yang cermat dan sesuai untuk mengatur penggunaan Bitcoin sebagai Legal Tender. Dengan adanya regulasi tersebut, dapat meningkatkan keberhasilan dari kebijakan yang diputuskan. Penetapan regulasi yang cermat dan sesuai dengan kondisi negara memerlukan waktu yang cukup. Selain itu, persiapan-persiapan yang memuat hal-hal seperti pengenalan Bitcoin sebagai Legal Tender yang mengharuskan adanya perubahan infrastruktur serta sistem pembayaran di El Salvador, membutuhkan waktu yang relatif lama. Maka dari itu, adanya keterbatasan waktu dapat mengakibatkan adopsi kebijakan yang kurang optimal atau kurang dipertimbangkan.

Pada 6 Juni 2021, Presiden Nayib Bukele sebagai pemerintah El Salvador, mengumumkan niatnya untuk mengadopsi bitcoin sebagai *Legal Tender* saat konferensi bitcoin 2021 atau Bitcoin Conference 2021 di Miami. Dirinya mengungkapkan tujuannya yaitu, untuk mempermudah masyarakat El Salvador yang tinggal di luar negeri dalam melakukan remitansi atau mengirim uang mereka ke kerabat terdekat mereka. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan dengan menggunakan bitcoin juga akan membuat transaksi digital menjadi lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat yang tidak mempunyai akses kedalam perbankan. Di mana, setelah dirinya mengumumkan niatnya tersebut, Pemerintah El Salvador mulai merancang undang-undang Bitcoin.

Pada 9 Juni 2021, Pemerintah El Salvador bersama dengan anggota parlemen menyelenggarakan kongres yang bertujuan untuk menyetujui rancangan undang-undang yang menjadikan Bitcoin sebagai *Legal Tender*. Dalam konferensi tersebut, terdapat 62 suara dari sejumlah anggota parlemen yang menyetujui penggunaan Bitcoin. Jumlah suara tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui. Selain itu, dalam kongres tersebut juga dijelaskan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah atau *Legal Tender* akan berlangsung dalam 90 Hari kedepan atau pada 7 September 2021 (Arslanian, Henri, Donovan, Blumenfeld, and Zamore 2021).

Berdasarkan peristiwa tersebut, telah menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi batasan waktu dalam mengimplementasikan Undang-Undang Bitcoin. Keputusan untuk mengadopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender*, diambil dengan cepat tanpa melalui proses evaluasi.

### 3.1.2 Analisis Keterbatasan Sumber Daya

Berdasarkan teori Bounded Rationality, pengambil kebijakan di El Salvador mungkin berusaha mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut dengan cara-cara tertentu, seperti mencari bantuan eksternal, bekerja sama dengan mitra internasional, atau mencari solusi alternatif untuk mengimplementasikan adopsi bitcoin. Pemerintah El Salvador sebelum mulai mengimplementasikan kebijakan adopsi Bitcoin, Pada tahun 2021, setelah mengesahkan Undang-undang bitcoin, diketahui pernah meminta bantuan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan *World Bank*. Menteri Keuangan El Salvador diketahui telah meminta bantuan dari *World Bank* dan IMF untuk membantu secara teknis terkait implementasi Bitcoin sebagai *Legal Tender*, namun World Bank dan IMF menolak

untuk membantu pelaksanaan rencana ini. World Bank menolak karena menganggap El Salvador tidak mampu mencapai tenggat waktu untuk memastikan bahwa Bitcoin dapat diterima secara nasional dalam tiga bulan. Sedangkan IMF, menolak karena menganggap akan ada masalah dalam segi hukum dan keuangan dalam menggunakan Bitcoin (Cafarella 2021).

Lalu, ada juga hal lain yang dapat menunjukkan bahwasannya Pemerintah El Salvador mempunyai keterbatasan terkait sumber daya. Keterbatasan terkait sumber daya dapat dilihat dalam undang-undang bitcoin yang telah disahkan pada 9 Juni 2021 di mana, pada pasal 6 disebutkan bahwa untuk tujuan akutansi, Dolar Amerika akan digunakan sebagai mata uang referensi (Roy 2021). Pemerintah El Salvador, belum memahami dampak terkait dengan penggunaan Bitcoin sehingga, dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah El Salvador lebih memilih untuk tetap menggunakan Dolar AS dalam berbagai hal yang berkaitan dengan akutansi dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya dalam melakukan perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat.

Selain itu, Pemerintah El Salvador dalam merancang aplikasi yang nantinya akan digunakan sebagai dompet atau *e-wallet* pada 7 September 2021, yang menjadi komponen penting dalam mengimplementasikan kebijakan adopsi Bitcoin, ternyata tidak merancang platform tersebut secara internal dengan sistem yang dirancang oleh pemerintah sendiri, melainkan dirancang oleh perusahaan swasta. Pemerintah El Salvador, telah melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta bernama Chivo S.A de C.V. Selain itu, dikarenakan selama penggunaannya terdapat beberapa masalah yang dirasakan oleh masyarakat El Salvador, terdapat perusahaan yang bergerak di bidang *Cryptocurrency* lain seperti Netki dan juga AlphaPoint yang

mencoba untuk bekerjasama dengan pemerintah El Salvador. Hal ini, telah menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Bitcoin menunjukkan bagaimana negara dikelola sebagai perusahaan swasta, menggantikan kebijakan publik dengan promosi iklan dari perusahaan swasta yang mengelola layanan Aplikasi Chivo, dengan perusahaan tersebut yang bekerja dengan dana publik (Artiga and López 2021).

### **3.2 Kemampuan Dalam Memproses Informasi**

Kemampuan dalam memproses informasi menunjukkan bagaimana pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan yang diambil serta menjadi pilihan kolektif. Pengambil kebijakan menurut *Bounded Rationality*, akan cenderung menghadapi kondisi acak di mana pengambil kebijakan akan dihadapkan dalam kondisi yang begitu kompleks terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dikarenakan, kondisi yang begitu kompleks tersebut membuat pengambil kebijakan cenderung menggunakan aturan praktis atau disebut sebagai pendekatan heuristik di mana, pendekatan heuristik merupakan metode atau strategi yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan yang memadai secara cepat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya (Jones 2002, 273).

#### *3.2.1 Analisis Keterbatasan Dalam Mengatasi Masalah*

Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dapat terjadi karena adanya ketidakpastian dalam memahami faktor penyebab masalah yang dapat menimbulkan kesulitan dalam melakukan trade-off antara tujuan yang berbeda. Dalam konteks ini, keterbatasan dalam memahami dan mengatasi masalah yang

kompleks mengacu pada seorang pengambil kebijakan dalam menghadapi kompleksitas masalah dengan melakukan trade-off antara tujuan yang berbeda. Pengambil kebijakan, cenderung mengalami keterbatasan berupa kesulitan dalam melakukan trade-off antar tujuan yang hendak dicapai. Menurut *Bounded Rationality*, pengambil kebijakan akan cenderung memiliki kesulitan dalam memutuskan mana yang lebih penting atau mana yang menjadi prioritas antara tujuan-tujuan tersebut. Maka dari itu, dalam menganalisa kemampuan dalam menyelesaikan masalah sebagaimana pemerintah El Salvador dalam memutuskan kebijakan tersebut, perlu untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Pemerintah El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin telah menyatakan tujuannya terkait kebijakan tersebut, tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut dapat merepresentasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara El Salvador terkait perekonomian. terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan tersebut. Pertama, terkait dengan inklusi keuangan. Dengan mengadopsi bitcoin sebagai *Legal Tender*, dapat memberikan akses keuangan kepada sebagian besar penduduk El Salvador yang tidak memiliki akses terhadap perbankan maupun akses terhadap lembaga keuangan. Kedua, terkait dengan pembangunan ekonomi. El Salvador adalah negara yang termasuk negara berkembang yang mengandalkan sektor-sektor tertentu. Maka dari itu, pemerintah El Salvador berupaya untuk meningkatkan perekonomian selain dengan mengandalkan sektor-sektor tersebut yaitu dengan mengadopsi bitcoin yang diharapkan dapat mendatangkan investor-investor yang hendak berbisnis di El Salvador sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan memperluas basis penggunaan bitcoin. Lalu,

tujuan berikutnya adalah dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan pengiriman uang dari luar negeri atau melakukan remitansi melalui lembaga keuangan tradisional yang cukup memakan biaya. Maka dari itu, tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi biaya pengiriman dengan adanya bitcoin diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat terkait biaya tersebut. Terakhir, Pemerintah mengambil kebijakan ini adalah untuk penyediaan alternatif mata uang. El Salvador adalah negara yang menggunakan Dolar AS sebagai mata uang yang sah. Maka dari itu, Pemerintah El Salvador tidak dapat mengendalikan kebijakan moneter secara penuh sebagaimana negara yang melakukan dolarisasi. Negara menjadi kehilangan kemampuannya dalam melakukan kebijakan moneter secara independent dan harus bergantung terhadap Amerika Serikat (Benomi and Lindahl 2014).

Dengan adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, hal ini telah merepresentasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara El Salvador. Meski begitu, upaya yang dilakukan Pemerintah El Salvador melalui kebijakan ini tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan negara-negara sekitarnya terkait regulasi mengenai Bitcoin, di mana penggunaan Bitcoin sebagai *Legal Tender* di berbagai negara masih belum banyak. Banyak negara yang masih belum menetapkan Bitcoin sebagai *Legal Tender*, akses internasional menjadi terbatas dikarenakan banyak negara terutama negara-negara di sekitar El Salvador yang masih berpegang pada mata uang konvensional. Adapun negara-negara di sekitar El Salvador, seperti Honduras, Guatemala, serta Amerika Serikat yang belum mengesahkan Bitcoin sebagai *Legal Tender*.

Berikutnya, Rezim Bukele atau Pemerintah El Salvador yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Nayib Bukele, juga menunjukkan ketidapahamannya terkait Bitcoin. Bitcoin sebelumnya mempunyai reputasi yang buruk, banyak hal yang dapat membuat reputasi Bitcoin menjadi buruk seperti adanya aktivitas ilegal, dan tingkat volatilitasnya yang tinggi. Mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran sah di El Salvador tidak memiliki banyak manfaat langsung kecuali potensi peningkatan penerimaan uang kiriman dan memberikan perhatian terhadap negara tersebut untuk jangka waktu tertentu. Kecuali, tingkat volatilitas Bitcoin stabil (Kumru 2021).

Selain itu, Bitcoin juga bukan merupakan komponen dari PDB. Apabila terdapat seseorang yang membeli Bitcoin untuk diinvestasikan terhadap suatu aset di negara El Salvador. Maka, nilai atau harga aset tersebut akan naik, tetapi belum tentu dapat meningkatkan PDB El Salvador. Akan lebih masuk akal apabila El Salvador lebih mengadopsi Stablecoin, di mana mata uang kripto tersebut harganya ditetapkan pada 1 Dolar AS (Hawkins 2022).

### 3.2.2 Analisis Keterbatasan Dalam Memproses Informasi

Menurut *Bounded Rationality*, seorang pengambil kebijakan akan cenderung menggunakan aturan praktis atau pendekatan heuristik di mana, pendekatan heuristik merupakan metode pemecahan masalah yang didasarkan pada aturan praktis atau pengalaman tanpa mengandalkan pemrosesan informasi secara sistematis atau menyeluruh.

Bitcoin merupakan hal baru di dunia keuangan serta belum banyak digunakan sebagai *Legal Tender*, sehingga sangat memerlukan evaluasi dalam mengimplementasikannya untuk menjadi *Legal Tender*. Maka dari itu, informasi

mengenai implikasi penggunaan Bitcoin sebagai *Legal Tender* dalam jangka pangang masih terbatas (Jelita 2021). Meski begitu pemerintah El Salvador tetap memutuskan untuk mengambil kebijakan mengadopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender*. Adapun proses-proses dalam merancang kebijakan mulai diberlakukan pada September 2021 untuk dapat berjalan lancar, proses-proses tersebut meliputi berbagai upaya seperti pengumpulan dana serta upaya dalam menarik masyarakat untuk menggunakan Bitcoin. Pertama, Bank Sentral El Salvador bersama dengan Pemerintah telah menerbitkan rancangan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur regulasi lembaga keuangan resmi yang akan menyediakan layanan konversi Dolar AS ke Bitcoin. Rancangan standar tersebut menjadi komponen penting dalam kelancaran kebijakan ini. Standar teknis tersebut, menetapkan beberapa persyaratan umum yang memadai untuk melindungi kepentingan masyarakat yang meliputi transparansi, privasi, serta layanan pengaduan. Kemudian, pemerintah El Salvador juga tetap memilik untuk melanjutkan kebijakan tersebut dengan melakukan upaya untuk memperoleh dana tambahan dari Bank Pembangunan El Salvador. Pada 1 Agustus 2021, melalui *Banco de Desarrollo de El Salvador* (BANDESAL), El Salvador berhasil mendapat dana sebesar 150 Juta USD dari Bank Pembangunan El Salvador tersebut (Rodriguez 2023).

Lalu, meskipun kebijakan tersebut banyak mendapat penolakan dari masyarakat serta pelaku bisnis di negara El Salvador yang tidak memahami sama sekali penggunaan Bitcoin. Pemerintah tetap menjalankan program yang dapat mendukung pengimplementasian kebijakan tersebut, dengan merancang program sosialisasi yang dijalankan oleh 4.000 instruktur yang berada di 50 lokasi yang telah ditetapkan. Instruktur tersebut, akan memberikan pelatihan kepada masyarakat

umum dengan menjelaskan cara mengunduh, menggunakan *e-wallet*, dan cara menggunakan ATM Bitcoin yang telah disiapkan di 50 lokasi yang telah ditetapkan (Gorjon 2021).

Selain itu, dalam mendorong penggunaan bitcoin, pemerintah telah menyiapkan aplikasi bernama Chivo yang dirancang oleh perusahaan swasta yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis oleh masyarakat tanpa dikenakan biaya atas transaksi mereka. Tidak hanya itu, dalam menanggapi masyarakat El Salvador yang tidak percaya akan Bitcoin, pemerintah El Salvador telah menyiapkan bonus ataupun insentif sejumlah 30 Juta Bitcoin untuk masyarakat yang mulai menggunakannya. (Artiga, Lopez 2021).

Terakhir, pemerintah cenderung menggunakan aturan praktis atau pendekatan heuristik yang dapat dilihat dalam beberapa hal, terkait implementasi Bitcoin di El Salvador yang telah menghabiskan setidaknya 205 Juta USD. Biaya tersebut belum termasuk pembelian bitcoin yang dilakukan pada 9 Juni 2021 sebesar 400 BTC, kemudian pada 28 Juni 2021 sebesar 200 BTC dan pada 7 September ketika kebijakan mulai diberlakukan sebesar 150 BTC. Sebelumnya, pada tahun 2017, Bitcoin mengalami kenaikan harga dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan yang menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Basis penggunaan Bitcoin semakin meluas hingga, pada tahun 2019 di negara El Salvador terdapat wilayah yang bernama El Zonte, menjadi kota pelopor dalam penggunaan Bitcoin. Awalnya, terdapat seseorang yang memberikan sumbangan besar dalam bentuk Bitcoin kepada sekelompok penggemar mata uang kripto di sana dengan syarat bahwa mereka tidak mengubahnya menjadi dolar (Fieser 2021).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kebijakan El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender* merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah menggunakan pendekatan heuristik di mana, pendekatan heuristik merupakan metode pemecahan masalah yang didasarkan pada aturan praktis atau pengalaman tanpa mengandalkan pemrosesan informasi secara sistematis atau menyeluruh. Pendekatan heuristik tersebut dapat terjadi dan digunakan dikarenakan, kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pengambil kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah El Salvador. Kompleksitas masalah tersebut, berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki dalam proses pengambilan kebijakan.

*Bounded Rationality*, mengacu pada tingkat rasionalitas pengambil kebijakan dalam melakukan pembuatan keputusan yang baik namun tidak optimal dikarenakan adanya penggunaan pendekatan heuristik oleh pengambil kebijakan. Adapun masalah atau keterbatasan sebagaimana *Bounded Rationality* di mana berkaitan dengan kemampuan pengambil kebijakan dalam memprediksi yang mengacu pada keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, kemampuan memproses informasi pengambil kebijakan juga mengacu terhadap keterbatasan dalam mengatasi masalah dikarenakan adanya kesulitan dalam melakukan trade-off antar tujuan dan pemrosesan informasi yang tidak proporsional sehingga kebijakan tersebut dapat diputuskan.

Dalam kontes kebijakan El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender, terdapat keterbatasan-keterbatasan tersebut dalam proses pengimplementasian kebijakan. Di mulai dari adanya keterbatasan waktu, dimana hal ini dapat ditunjukkan dengan peristiwa-peristiwa selama proses pengimplementasian kebijakan yang dimulai pada 6 Juni 2021, ketika Pemerintah El Salvador yang dipimpin oleh Presiden Nayib Bukele mengumumkan niatnya untuk mulai menggunakan Bitcoin sebagai *Legal Tender* di mana, setelah pengumuman tersebut pemerintah El Salvador mulai merancang undang-undang terkait Bitcoin. Dilanjutkan dengan kongres yang dihadiri oleh Pemerintah El Salvador bersama parlemen-parlemennya yang menyetujui rancangan undang-undang tersebut dengan terdapat 62 suara yang menyetujui. Meski begitu, dalam rancangan tersebut pemberlakuan kebijakan akan dimulai 90 hari setelah kongres tersebut atau lebih tepatnya pada 7 September 2021. Pasalnya, Bitcoin merupakan hal yang relatif baru, sehingga memerlukan regulasi yang cermat dan tepat dalam mengimplementasikannya dan perumusan regulasi tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menciptakannya. Tetapi, dalam rancangan tersebut telah disepakati bahwasannya kebijakan ini, akan mulai diberlakukan dalam 90 Hari kedepan. Hal ini telah menunjukkan bahwa, terdapat keterbatasan waktu dalam merumuskan kebijakan dan keputusan tersebut cenderung diambil dengan cepat tanpa melalui proses evaluasi.

Berikutnya, terkait dengan keterbatasan sumber daya di mana pemerintah El Salvador dalam mendukung kebijakan tersebut, tidak merancang dompet digital yang telah disiapkan. Melainkan, bekerjasama dengan perusahaan swasta yang bernama Chivo S.A de C.V dengan kebebasan yang dimiliki dan didanai

menggunakan dana publik. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga ditunjukkan dengan upaya pemerintah El Salvador yang meminta bantuan IMF dan *World Bank*, tujuan dalam meminta bantuan tersebut adalah terkait teknis dalam pengimplementasian kebijakan. Meskipun permintaan bantuan tersebut ditolak, tetapi hal ini telah menunjukkan bahwa negara El Salvador mempunyai keterbatasan terkait sumber daya dalam merumuskan kebijakan tersebut. Lalu, keterbatasan sumber daya lainnya dapat dilihat dalam undang-undang Bitcoin di negara El Salvador. Pada undang-undang pasal 6 yang menyebut bahwa dalam kegiatan yang berkaitan dengan sistem akuntansi, tetap merujuk pada Dolar AS. Hal ini, telah membuktikan bahwa terdapat keterbatasan sumber daya dalam menangani dampak yang mungkin terjadi di negara El Salvador, sehingga pemerintah lebih merujuk pada Dolar AS dalam kegiatan terkait akuntansi.

Adapun keterbatasan lainnya yang mengacu pada kemampuan pengambil kebijakan dalam memproses informasi. Keterbatasan yang pertama berkaitan dengan penyelesaian masalah. Keterbatasan dalam mengatasi masalah, mengacu pada kesulitan pengambil kebijakan dalam melakukan trade-off antar tujuan. Pengambil kebijakan tidak mampu menciptakan solusi yang optimal dikarenakan banyaknya masalah kompleks yang dihadapi. Masalah kompleks tersebut dapat dilihat melalui tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin merepresentasikan masalah yang dihadapi, mulai dari inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi hingga penyediaan alternatif mata uang. Tetapi, kebijakan mengadopsi Bitcoin tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pasalnya, apabila tujuan tersebut berkaitan dengan inklusi keuangan, tidak banyak negara-negara yang memberlakukan Bitcoin sebagai *Legal Tender*. Banyak

negara-negara yang masih menggunakan mata uang konvensional. Sehingga, akses internasional masih cenderung terbatas. Maka dari itu, penyelesaian masalah terkait inklusi keuangan tidak dapat diselesaikan secara optimal. Selain itu, reputasi Bitcoin yang memburuk dikarenakan tingkat volatilitasnya yang tinggi, membuat investor ragu untuk melakukan investasi di negara El Salvador. Upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal, terlebih Bitcoin bukan termasuk komponen dari PDB.

Keterbatasan yang terakhir adalah terkait pemrosesan informasi. Keterbatasan ini, mengacu pada pemrosesan informasi yang tidak proporsional sehingga pengambilan kebijakan cenderung menggunakan pendekatan heuristik yang merupakan metode pemecahan masalah yang didasarkan pada aturan praktis atau pengalaman tanpa mengandalkan pemrosesan informasi secara sistematis atau menyeluruh. Pertama, perlu diketahui bahwasannya informasi terkait implikasi dari penggunaan Bitcoin masih terbatas dikarenakan Bitcoin yang relatif baru dan tidak ada negara yang menggunakannya sebagai *Legal Tender*. Tetapi, Pemerintah El Salvador tetap memutuskan kebijakan tersebut dengan membuat regulasi bersama Bank Sentral El Salvador. Selain itu, pemerintah El Salvador juga tetap melanjutkan untuk memilih kebijakan tersebut dengan melakukan perolehan dana tambahan melalui Bank Pembangunan El Salvador sebanyak 150 Juta USD. Dan meskipun kebijakan tersebut banyak mendapat penolakan, pemerintah tetap memilih kebijakan tersebut. Adapun proses berikutnya adalah pemerintah tetap melakukan sosialisasi terkait pemahaman mengenai Bitcoin dan telah menyiapkan bonus sebesar 30 Juta BTC untuk masyarakat yang menggunakan Bitcoin melalui aplikasi yang telah disiapkan tersebut. Terakhir, meskipun kebijakan ini dirumuskan dengan

adanya keterbatasan waktu dan sumber daya, tetapi dana yang dikeluarkan pemerintah telah menghabiskan setidaknya 205 Juta USD. Hal ini, telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperkirakan jumlah anggaran yang dikeluarkan dan tetap memilih untuk melanjutkan kebijakan tersebut.

## **4.2 Rekomendasi**

Kebijakan El Salvador mengadopsi Bitcoin merupakan hal baru yang sangat memerlukan pengawasan dan pertimbangan sebagai bahan evaluasi dalam proses perkembangannya. Sebuah inovasi teknologi tentunya akan dapat memiliki banyak manfaat apabila dipergunakan dengan baik dan selalu memperhatikan potensi-potensi negatif yang kemungkinan terjadi, terlebih Bitcoin merupakan inovasi dalam bidang keuangan. Kebijakan yang tepat sasaran serta sesuai dengan capaian pembangunan berkelanjutan juga perlu untuk diperhatikan dalam merealisasikan hal tersebut. Pasalnya, dalam memutuskan suatu kebijakan apalagi kebijakan tersebut merupakan kebijakan publik dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, tentunya perlu untuk memahami secara komprehensif hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Mempunyai impian besar memang sangat diperlukan dalam memutuskan suatu kebijakan. Tetapi, mempelajari kendala serta permasalahan-permasalahan yang ada, juga sangat diperlukan dalam memutuskan suatu kebijakan terlebih kebijakan kolektif yang menyangkut banyak orang. Hal ini dapat memberikan kejelasan terkait arah kebijakan tersebut, sehingga tidak hanya menjadi sebuah tujuan atas dasar kepentingan pribadi sebagai *Homo Economicus*.

Diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat membahas dari segi *Rational Choice* ataupun penelitian yang menganalisis bahwasannya kebijakan mengadopsi

Bitcoin merupakan hal baik atau menjadi sebuah Diplomasi Ekonomi untuk negara-negara yang tertarik dalam melakukan hal yang sama yaitu mengadopsi mata uang kripto salah satunya adalah Bitcoin, sebagai alat pembayaran yang sah karena sisi positif yang ditawarkan. Selain itu, dikarenakan Bitcoin ini merupakan hal baru dalam dunia keuangan dan memerlukan adanya pengawasan terkait dampak negatif ataupun sebagaimana penelitian ini menjelaskan dari sisi *Bounded Rationality*, di mana terdapat keterbatasan kognitif seseorang dalam memutuskan suatu kebijakan, sehingga memerlukan adanya perbaikan-perbaikan atau upaya dalam merealisasikan atau memunculkan potensi dari keberadaan *Blockchain* yang terdapat dalam mata uang kripto salah satunya adalah Bitcoin. Adapun Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah, meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang Bitcoin dan teknologi *Blockchain* secara menyeluruh. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam memahami risiko dan manfaat serta mempersiapkan diri dalam menghadapi resiko tersebut. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan berikutnya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi prioritas pemerintah terkait kebijakan mengenai Bitcoin. Otoritas perlu memastikan adanya mekanisme perlindungan yang memadai, seperti aturan yang ketat terhadap praktik penipuan, transparansi yang lebih baik dalam perdagangan Bitcoin. Selain itu, kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur pasar Bitcoin juga diperlukan. Hal ini, termasuk upaya dalam memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme hingga pembentukan lembaga keuangan yang terlibat dalam perdagangan Bitcoin untuk dapat mengatur kegiatan penambangan Bitcoin. Kerja sama Internasional juga

diperlukan dalam mengintegrasikan perekonomian untuk dapat mengembangkan standar terkait Bitcoin yang lebih luas. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, dapat memberikan kerangka kerja yang lebih kuat terkait kebijakan El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin sebagai *Legal Tender*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvarado, Jimmy. 2021. *Chivo es una empresa privada financiada con fondos públicos*. 8 September. Accessed Juli 17, 2023. [https://elfaro.net/es/202109/el\\_salvador/25707/Chivo-es-una-empresa%02privada-financiada-con-fondos-p%C3%BAblicos.htm](https://elfaro.net/es/202109/el_salvador/25707/Chivo-es-una-empresa%02privada-financiada-con-fondos-p%C3%BAblicos.htm).
- Alvarez, Fernando E., David Argente, and Diana Van Patten. 2023. "ARE CRYPTOCURRENCIES CURRENCIES? BITCOIN AS LEGAL TENDER IN EL SALVADOR." *NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH*.
- Arslanian, Henri, Robert Donovan, Matthew Blumenfeld, and Anthony Zamore. 2021. "El Salvador's law: a meaningful test for Bitcoin."
- Artiga, César, and Meraris López. 2021. "BITCOIN ADOPTION AND MINING IN EL SALVADOR Deepening of inequalities and setbacks in environmental and climate change matters." *PERSPECTIVES*.
- Benomi, Carl-Fredrik, and Susanna Lindahl. 2014. "Dollarization in Ecuador and El Salvador - its Impact on Fundamental Macroeconomic Variables."
- Bignell, Francis. 2022. *Central Bank of Honduras Reaffirms Position on Digital Assets as Cryptocurrency Grows in LatAm*. 08 Agustus. Accessed 07 17, 2023. <https://thefintechtimes.com/central-bank-of-honduras-reaffirms-position-on-digital-assets-as-cryptocurrency-grows-in-latam/>.
- Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Deposit Insurance Corporation, Office of the Comptroller of the Currency. 2023. "Joint Statement on Crypto-Asset Risks to Banking Organizations."
- Böhme, Rainer, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, and Tyler Moore. 2015. "Bitcoin: Economics, Technology, and Governance." *The Journal of Economic Perspectives*.
- Cafarella, Haley. 2021. "World First as El Salvador Adopts Bitcoin as Currency." 29 June. Accessed June 20, 2022.
- Central America Data. 2021. *Cryptocurrencies are Illegal in Guatemala*. 22 Februari. Accessed 07 17, 2023. [https://en.centralamericadata.com/en/article/home/Cryptocurrencies\\_are\\_II\\_legal\\_in\\_Guatemala#:~:text=The%20document%20dated%20February%2019,transactions%20of%20goods%20and%20services.%22](https://en.centralamericadata.com/en/article/home/Cryptocurrencies_are_II_legal_in_Guatemala#:~:text=The%20document%20dated%20February%2019,transactions%20of%20goods%20and%20services.%22).
- Corbo, Vittorio, Andres Elberg, and Jose Tessada. 1999. "MONETARY POLICY IN LATIN AMERICA: UNDERPINNINGS AND." *CUADERNOS DE ECONOMIA*.
- Fajri, Afrizal, and Muhammad Yamin. n.d. "DIGITAL CURRENCY LIKE BITCOIN WITHIN THE INTERNATIONAL."
- Fardiansyah, Hardi, Alfi Rochmi, Mashudi Hariyanto, Hermi Oppier, Hasmin Tamsah, Ansar, Karolina Rewa, rainer 2022. *EKONOMI MONETER (TEORI DAN KEBIJAKAN)*. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA.
- Gorjon, Sergio. 2021. "THE ROLE OF CRYPTOASSETS AS LEGAL TENDER: ." *ANALYTICAL ARTICLES*.

- Gusarova, Svetlana, Igor Gusarov, and Margarita Smeretchinskii. 2021. "Building a digital economy (the case of BRICS)."
- Hanifa, Aleyya, Astrella Depari, Genta Maulana, and Jonathan Alfa. 2016. "ANALISIS KEBIJAKAN DOLARISASI DALAM MONETER DOMESTIK DALAM." Makalah, Depok.
- Harahap, Novita Hannum, Fika Nurtivanny, M Luthfi Perdana Siregar, M Rayhan Kamil, and Khairina Tambunan. 2022. "PENERAPAN DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI ALTERNATIF STANDAR MONETER INTERNASIONAL : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR ." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*.
- Hawkins, John. 2022. *Setahun berselang, eksperimen Bitcoin sebagai alat bayar resmi di El Salvador gagal total*. 5 10. Accessed Juni 17, 2023. <https://theconversation.com/setahun-berselang-eksperimen-bitcoin-sebagai-alat-bayar-resmi-di-el-salvador-gagal-total-191853>.
- Hidalgo, Juan Carlos. 2009. "El Salvador A Central American Tiger ?"
- Indrayani, Irma. 2022. "INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) DAN PENANGGULANGAN KRISIS MONETER DI INDONESIA."
- Jones, Brian D. 2002. "Bounded Rationality and Public Policy: Herbert A. Simon and the Decisional Foundation." *Policy Sciences*.
- Kamasa, Frassminggi. 2014. "Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional."
- Kshetri, Nir. 2022. "El Salvador's Bitcoin Gamble." *COMPUTING'S ECONOMICS*.
- Kumru, Cagri. 2021. *2021 in Review: El Salvador's Bitcoin Experiment*. 17 Desember. Accessed Juli 27, 2023. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/el-salvadors-bitcoin-experiment/>.
- Marroquin, Tatiana. 2022. "BITCOIN AND PUBLIC FINANCE IN EL SALVADOR Solution or deepening of a pre-existing crisis?" *PERSPECTIVE*.
- McClurg, Steven. 2021. "The Bitcoin Effect Part II: LatAm Bitcoin Adoption." *Valkyrie*.
- Pamungkas, Mahendra Lantang, Riswanti Dyah Sekar Rahayu, and Trieska Ayu Krisyanti. 2019. "Perbandingan Sistem Pinjaman IMF dan Brics New Development Bank serta Potensi Dominasi Sistem Moneter Internasional." *Nation State: Journal of International Studies*.
- Pena, Jana Cristina Duarte. 2019. "IN BLOCKCHAIN WE TRUST? The Good, The Bad and The Ugly of Blockchain in Humanitarian and Development Aid."
- Rivera-Solis, and Luis Eduardo. 2012. "Dollarization in El Salvador: Revisited." *Munich Personal RePEc Archive*.
- Rodriguez, Garay A M. 2023. "Implementación de BITCOIN en El Salvador." *Revista Gestión y Desarrollo Libre*.
- Roy, Avik. 2021. *El Salvador's Bitcoin Law: Full English Text*. 9 Juni. Accessed 7 17, 2023. <https://freopp.org/el-salvadors-bitcoin-law-full-proposed-english-text-9a2153ad1d19>.
- Towers, Marcia, and Silvia Borzutzky. 2004. "The Socioeconomic Implications of Dollarization in El Salvador." *Latin American Politics and Society*.

- Tunsyakdiah, Halimah. n.d. "ANALISIS PEMBUATAN KEPUTUSAN EKONOMI (ECONOMIC DECISION) ."
- Turpin, Jonathan B. 2014. "Bitcoin: The Economic Case for a Global, Virtual Currency Operating in an Unexplored." *Indiana Journal of Global Legal Studies*.
- Ugalde, Antonio, Ernesto Selva-Sutter, Carolina Castillo, Carolina Paz, and Sergion Canas. 2000. "Conflict And Health: The Health Costs Of War: Can They Be Measured? Lessons From El." *British Medical Journal* 169.
- Wijaya, Firda Nur Amalia. 2019. "BITCOIN SEBAGAI DIGITAL ASET PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*.